

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi pada masa sekarang, didukung oleh tingginya tingkat kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, persaingan bisnis yang ketat, serta pertumbuhan dunia usaha. Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan *revenue* dan menurunkan *cost* pada perusahaan. Perkembangan dalam teknologi informasi, selain dapat mengurangi *cost* transaksi dan masalah informasi asimetri, juga dapat meningkatkan skala dan lingkup ekonomi dalam semua sektor bisnis (Albrecht dan Sack, 2000). Pada tahun 1998, proyek visi dari *the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* menyatakan bahwa kemajuan secara teknologi telah mempengaruhi profesi akuntan secara signifikan (AICPA 1998a).

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh yang cukup signifikan pada berbagai sektor, khususna pada bidang bisnis dan organisasi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada era sembilan puluhan ternyata tidak hanya dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan saja, tetapi juga oleh kantor akuntan publik (KAP). Tercatat lebih dari 10.000 perusahaan di dunia menggunakan sistem teknologi terintegrasi seperti *software* SAP R/3. Gibbs (1998) juga menyatakan perusahaan yang memakai sistem integrasi tersebut mengalami kenaikan 35 persen dalam tiga tahun ke depan.

Sebagian besar perusahaan menengah besar telah menggunakan *software* akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Penggunaan *software* akuntansi ini menyebabkan beberapa proses akuntansi manual sudah mulai ditinggalkan. Selain manfaat ekonomi yang diperoleh, muncul resiko baru yang dihadapi oleh pebisnis yaitu munculnya tindak kejahatan (*fraud*) dengan memanfaatkan teknologi komputer. Resiko *fraud* ini menjadi salah satu faktor yang harus disadari oleh profesi akuntan khususnya dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan.

Auditor memiliki peran penting untuk menemukan indikasi adanya tindakan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan *auditee*. Sesuai Standar Audit 327, dalam lingkungan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, maka tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan pengujian manual. Karena itulah, teknik audit terkomputerisasi dan aplikasi audit akan banyak membantu auditor untuk lebih fokus terhadap area yang lebih tinggi.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pendeteksian *fraud*, auditor seyogyanya mempertimbangkan teknik-teknik audit berbasis komputer yang dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (SA 327).

Selain itu, berdasarkan Standar Audit Seksi 335 [PSA No. 57] Auditing dalam Lingkungan Sistem Informasi Komputer, paragraf 04 sampai dengan paragraf 06 menjelaskan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penggunaan TABK. Tingkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor tergantung atas

kompleksitas dan sifat TABK dan sistem akuntansi entitas. Oleh karena itu, TABK merupakan keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki auditor.

Dengan menggunakan TABK, auditor dapat melakukan audit walaupun dokumen yang masuk maupun jejak audit (*audit trail*) tidak dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun menggunakan sistem yang terkomputerisasi, pengendalian tetap harus diterapkan guna mengurangi resiko kesalahan dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar akurat. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menggunakan *Generalized Audit Software* yang didesain untuk melaksanakan audit atas aplikasi-aplikasi yang terkomputerisasi. Dalam artikel tentang perbandingan *software* audit terbaik yang dikutip pada sebuah *FraudMagazine*, pada kenyataannya beberapa *software* siap digunakan di dunia bisnis dalam pendeteksian *fraud* seperti Excel, Access, IDEA, ACL dan lainnya (Rich Lanza, *Fraud magazine*).

Di Indonesia, belakangan ini tercatat tidak sedikit auditor yang ikut andil dalam melakukan praktik kecurangan akuntansi. Diantaranya, skandal keterlibatan 10 KAP di Indonesia dalam praktik kecurangan keuangan. KAP-KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 bank sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hasil audit mengungkapkan bahwa laporan keuangan bank-bank tersebut sehat. Saat krisis menerpa Indonesia, bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Ternyata baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah bahwa KAP-KAP tersebut terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi. 10 KAP yang dituduh melakukan praktik kecurangan akuntansi adalah Hans Tuanakotta and

Mustofa (Deloitte Touche Tohmatsu's *affiliate*), Johan Malonda *and Partners* (NEXIA International's *affiliate*), Hendrawinata *and Partners* (Grant Thornton International's *affiliate*), Prasetyo Utomo *and Partners* (Arthur Andersen's *affiliate*), RB Tanubrata *and Partners*, Salaki *and Salaki*, Andi Iskandar *and Partners*, Hadi Sutanto (menyatakan tidak bersalah), S. Darmawan *and Partners*, Robert Yogi *and Partners*. Pemerintah pada waktu itu hanya melakukan teguran tetapi tidak ada sanksi. Satu-satunya badan yang berhak untuk menjatuhkan sanksi adalah BP2AP (Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik) yaitu lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah melalui investigasi BP2AP menjatuhkan sanksi terhadap KAP-KAP tersebut, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu BP2AP hanya melarang 3 KAP melakukan audit terhadap klien dari bank-bank, sementara 7 KAP yang lain bebas (Suryana, *The Jakarta Post* : 2002).

Belum lagi, pada tahun 2008 terdapat beberapa kantor akuntan publik di Bandung yang dibekukan izin usahanya dan auditor KAP tersebut harus menerima sanksi wajib mengikuti pendidikan profesional kembali maupun pembekuan izin kerja. KAP tersebut salah satunya, KAP Sugiono Poulus yang telah dibekukan dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008, dikarenakan KAP tersebut melakukan pelanggaran atas SPAP. Kemudian KAP tersebut dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. (sumber: SK Menteri Keuangan Nomor: 7040/KM.1/2008).

Skandal pada fenomena yang telah diungkap pada paragraf sebelumnya merupakan sebagian kecil dari contoh kasus pelanggaran Standar Auditing dan SPAP yang dilakukan oleh auditor. Hal tersebut, sangat disayangkan sekali mengingat auditor sebagai pihak independen, seharusnya dapat mempertanggungjawabkan dan menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Dengan adanya skandal tersebut, mengakibatkan menurunnya kepercayaan terkait memburuknya kinerja auditor di mata publik. Hal tersebut dikarenakan kinerja auditor sangat erat kaitannya dengan kualitas output yang dihasilkannya. Untuk itu, auditor perlu meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang memadai guna meningkatkan kinerja dalam upaya membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Oleh karena itu, penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer ini pula diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor dalam pelaksanaan audit. Hal itu pula didukung oleh pemerintah, yaitu dimana ketika BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengadakan Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) untuk pada auditor yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Oktober 2011 lalu (Sumber: www.bpk.go.id).

Hariyati (2010) meneliti tentang pengaruh penerimaan dan penggunaan TABK dan dampaknya terhadap kinerja auditor dengan menggunakan metode survey terhadap 110 auditor di BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Gorontalo, menemukan hasil yang menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan TABK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Sedangkan, Sindik Widati (2008) yang meneliti tentang pengaruh faktor kesesuaian tugas teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik tersebut.

Dengan menggunakan sampel auditor di kota Bandung, penelitian ini ingin menguji apakah penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer dalam rangka meningkatkan kinerja auditor, memiliki pengaruh positif atau tidak.

Oleh karena itu, penulis perlu mengadakan penelitian dan analisis dengan mengambil judul “Pengaruh penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) terhadap kinerja auditor Kota Bandung “.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana gambaran perkembangan Teknik Audit Berbantuan Komputer?
- b. Bagaimana gambaran kinerja auditor?
- c. Bagaimana pengaruh penerapan teknik audit berbantuan komputer terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui tentang gambaran Teknik Audit Berbantuan Komputer.
- b. Untuk mengetahui tentang gambaran kinerja auditor.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer terhadap kinerja auditor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Secara teoritis, memberikan masukan bagi pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer dan kinerja auditor.
- b. Secara Empiris, memberikan kontribusi bagi KAP terkait dengan penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer oleh auditor untuk lebih memaksimalkan kinerjanya.